

DEMOKRASI DALAM GENGGMAN PARA PEMBURU RENTE (STUDI KASUS ASAHAN SUMATERA UTARA)

Desi Rahmawati

Abstract

Vedi R. Hadiz's concern on New Order's strong and durable influence to current politics (old predatory interest/ durable capitalist oligarchy) is quite interesting. His thesis that Indonesian democracy is flawed due to old predatory interest rooted in New Order tends to be problematic in some ways as it ignores context as well as actors' contribution. This writing, therefore, argues that Hadiz's structural explanation does not work in all localities, even North Sumatra—his main research locus. Rather, it argues that explaining the correlation between democracy and predatory interest (rent seeking), one necessarily paying attention to specific logic ("abstract structure") works in localities and actors' consideration upon it.

Keywords: democracy, politic, north sumatera

A. PENDAHULUAN

Cacatnya demokrasi di Indonesia selama ini banyak dianalisis dengan mengambil fokus pada 'hal-hal baru' yang dulu tidak muncul selama masa otoritarianisme; misalnya mengaitkan antara demokrasi dengan menguatnya institusi tradisional, identitas etnik, kekerasan komunal, disintegrasi, dan *local regime/ bossism*. Sementara 'hal-hal lama' seperti kaitan antara demokrasi dan rezim lama sangat jarang dibahas. Diantara sedikit pembahas, tulisan-tulisan Vedi R. Hadiz dengan *old predatory interest*-nya sangat menarik. Kepedulian pada isu *rent seeking* sebagai penyebab dari cacatnya demokrasi mengundang dukungan sekaligus kritik dari ilmuwan lain karena ia secara langsung mengaitkan demokrasi lokal yang buruk dengan pengaruh yang tak berkesudahan dari Orde Baru yang telah tumbang. Tulisan ini sendiri dibuat berdasarkan kegelisahan atas sejumlah kritik terhadap Hadiz; diantaranya bahwa ia secara gegabah menggeneralisir penyebab dari cacatnya demokrasi di Indonesia dengan mengabaikan fakta bahwa Indonesia memiliki keberagaman lokalitas (Kurniadi, 2008).

Selain itu, perspektif strukturalis ala Marx yang amat kuat cenderung terkesan mengabaikan kontribusi aktor masa kini dalam membentuk kualitas demokrasi. Marxisme klasik yang ia gunakan secara sangat kuat cenderung fokus hanya pada

kapital material dan gagal menjelaskan aspek struktural yang terbentuk di tingkat lokal. Selanjutnya, apabila demokrasi memang benar dicerai oleh sesuatu yang berakar pada masa lalu, Hadiz juga tidak menjelaskan tentang bagaimana hal tersebut menginfiltrasi para aktor dan membuat mereka mereproduksi hal-hal lama tersebut. Kesetiaannya pada perspektif struktural, oleh karenanya, jelas mengasumsikan bahwa aktor politik adalah pengikut dari struktur tanpa membuka peluang penjelasan bahwa mereka mungkin juga melakukan kalkulasi strategis dalam merespon struktur dan hal itu berkontribusi terhadap kualitas demokrasi. Pengabaian terhadap kemungkinan bahwa aspek struktur dan aktor (agency) saling bertautan juga telah menyebabkannya teridentifikasinya secara bahwa para pemburu rente dalam politik hari ini adalah elit birokrat dan politisi yang memiliki hubungan sangat erat dengan Orde Baru (Hadiz 2003), dan mengabaikan kemungkinan hadirnya aktor-aktor lain dan alasan (logika) tentang hal tersebut.

Hadiz mengambil sebagian besar datanya pada tahun-tahun awal pasca reformasi. Sementara saat ini, lebih dari satu dekade kemudian, kebutuhan untuk mereview temuannya menjadi makin urgen, untuk melihat apakah penjelasan-penjelasanannya masih bekerja di tingkat lokal, untuk melihat apakah

generalisasinya bahkan berlaku untuk daerah lain di Sumatera Utara, dan kemudian membuktikan bahwa aktor—sebagaimana struktur—juga berkontribusi terhadap kondisi demokrasi saat ini.

Tulisan ini merupakan ringkasan dari tesis saya yang mengambil studi kasus di Asahan. Diantara sejumlah alasan untuk memilih Asahan hal yang paling penting adalah kemunculan secara bersama-sama praktik politik yang kurang demokratis yang berkaitan erat dengan isu korupsi atau *rent seeking*, pada tahun 2010-12. Kemunculan isu ini dalam politik sehari-hari ini menjadi menarik misalnya berkaitan dengan apakah ada logika tertentu (“struktur abstrak”) yang tidak terkait dengan Orde Baru dan apakah respon aktor terhadap hal ini berkontribusi terhadap potret demokrasi yang redup? Beberapa kasus yang dibahas di tulisan ini adalah:

1. Penutupan akses terhadap informasi publik. Tahun 2011 Bupati Asahan—memiliki kaitan erat dengan Orde Baru di tingkat lokal—menerbitkan surat keputusan yang melarang birokrat memberikan informasi apapun kepada aktivis, pers, dan masyarakat umum. Anehnya, kebijakan ini sepenuhnya dipatuhi, nyaris tidak mendapatkan kritik dari aktivis dan anggota DPRD hingga melahirkan rumor adanya “permainan rente” antara aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah.
2. Diskriminasi kebijakan sosial. Pasca dilantik sebagai bupati di akhir tahun 2010, T.G. Simatupang mengeluarkan “Program Imtaq (Iman dan Taqwa)”; program religius yang dilekatkan pada program-program social seperti subsidi perbaikan rumah (bedah rumah) dan kredit mikro bagi masyarakat miskin. Program ini menjadi kontroversial karena para pelamar bantuan selain menjalani asesmen secara ekonomi juga secara religius berdasarkan indikator-indikator keimanan menurut Islam. Lagi-lagi program ini tidak banyak dikritisi namun menghasilkan rumor bahwa sang bupati tengah memfasilitasi para politisi dari PKS—salah satu partai yang mengusungnya dalam pilkada—untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
3. Pengabaian terhadap aspirasi masyarakat. Tahun 2012 ratusan pedagang kecil dari pasar tradisional protes karena mereka kehilangan hak sewa atas kios setelah renovasi pasar. Protes-protes mereka diabaikan selama berminggu-minggu dan baru mendapatkan perhatian setelah beberapa orang pedagang perempuan pingsan karena kelelahan dan frustrasi. Pemda akhirnya mengakui bahwa ada kesalahan manajemen akibat korupsi para birokrat menengah dan bawah/petugas lapangan. Sebulan kemudian, kasus pasar tradisional lain kembali muncul. Kali ini berawal dari kebakaran hebat yang meluluhlantakkan pasar hingga melahirkan rumor keterlibatan aktor-aktor pemerintah yang merencanakan korupsi untuk proyek pembangunan kembali pasar. Untuk menepis kabar ini pemerintah membangun pasar darurat untuk para pedagang korban. Namun, kali ini pertolongan pemerintah justru merugikan kelompok pedagang lain yaitu pemilik ruko di jalan utama dimana pasar darurat dibangun. Protes yang dipimpin oleh aktivis yang kebetulan menggantungkan kehidupan ekonominya pada ruko diabaikan hingga penelitian ini selesai dilakukan.
4. Konflik tanah dan kriminalisasi aktivis. Di akhir tahun, beberapa aktivis memobilisasi penduduk untuk merebut tanah negara. Sang pemimpin berargumen bahwa aksi ini dilakukan guna mencegah para pejabat mengalihkan kepemilikan tanah negara menjadi tanah mereka pribadi. Aksi ini tentu ditentang oleh pemda, dengan menggunakan kekerasan dan kriminalisasi aktivis. Perseteruan antara pemda dan sejumlah aktivis terus berlanjut hingga pengadilan.

Permasalahan di atas terkesan seperti empat kasus yang berbeda. Namun, sesungguhnya ada benang merah di antara semuanya yaitu isu *rent seeking*; sehingga menimbulkan pertanyaan: “Bagaimana memahami teka-teki gejala politik yang tidak demokratis di Asahan? Apakah disebabkan oleh *old predatory interest* atau faktor-faktor politik baru?”.

B. PEMBAHASAN

B.1. Debat tentang Penyebab Cacatnya Demokrasi

Studi tentang cacatnya demokrasi di Indonesia selama ini dibahas melalui berbagai persepektif. Hadiz dengan menggunakan Marxisme klasik melihat demokrasi dengan menekankan pada keterkaitannya dengan material kapital, melihat struktur sebagai “aktivitas mekanis” para aktor lama yang menjiplak Orde Baru yang telah tumbang. Meski demikian argumentasinya tentang *old predatory interests* ini banyak didukung oleh ilmuwan lain (misalnya Robison & Hadiz 2004, Winters 2012).

Secara umum *old predatory interest* dipergunakan oleh Hadiz untuk menjelaskan jaringan oligarki dan patronase yang terkait dengan *rent seeking* dan Orde Baru; meyakini bahwa banyak pengaturan di belakang layar yang tak berubah sekalipun rezim telah berganti (Aspinall 2013, p.230). Sejak awal masa pasca reformasi, Hadiz memprediksi bahwa Orde Baru akan terus berpengaruh dalam kehidupan politik. Elemen-elemen sistem patronase lama (kontrol langsung dari institusi negara; civil society yang lemah; dan system patronase yang ekstensif) akan terus bekerja selagi mereka mereposisi diri dalam system politik baru melalui aliansi-aliansi seperti parpol. Tidak ada kekuatan reformasi, yang ada adalah kepentingan dari elemen-elemen predator lama. Namun system patronase tidak lagi tersentral, namun menunjukkan kompetisi melalui parpol dan parlemen sebagai kendaraan politik untuk memelihara kekuasaan oligarki dan juga guna memperoleh uang (Hadiz 2003a p.111-4; 2003b). Baginya, rezim otoritarian telah meninggalkan jejak dalam demokrasi di hari ini dalam bentuk oligarki kapitalis yang menempatkan koalisi antara investor dengan pejabat politik dan birokrasi untuk merampok uang negara. Desentralisasi yang awalnya didesain untuk menstimulasi demokrasi di tingkat lokal pada akhirnya gagal. Dengan perspektifnya yang sangat struktural—untuk mengkritik pendekatan neo-institutional maupun pendekatan aktor-, Hadiz menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena ‘reformasi yang tak selesai’. Reformasi tak pernah berhasil menghapus

jaringan patronase lama. Sebaliknya, ia justru memfasilitasi para aktor bekas Orde Baru untuk mendapatkan pijakan baru untuk mereposisi dirinya sebagai elit partai. Faktanya, akses mereka pada uang negara—sumberdaya material maupun instrument intimidasi politik—adalah kunci untuk memperoleh posisi di tingkat lokal (Hadiz 2003a, 2003b).

Hadiz ada dalam kelompok ilmuwan yang percaya bahwa sebuah negara akan selalu ada dalam fase ‘transisi menuju demokrasi’; sebuah kondisi yang tak akan pernah sampai pada ‘konsolidasi’ dan demokrasi yang matang’ (van Klinken 1999 dalam Hadiz 2003b: 120), ataupun mengubah masyarakat otoritarian menjadi lebih terbuka (Kingsbury and Budiman 2002 in Hadiz, 2003: 120). Ia juga percaya bahwa transisi menuju demokrasi bagi Indonesia telah usai karena telah menghasilkan sesuatu yang lain, yaitu system yang bekerja atas dasar kompromi dan negosiasi di balik layar, dengan karakter, pola, logika, dan dinamika yang dibentuk dan dijalankan oleh politik uang dan kekerasan (Hadiz 2003a, 2003b, 2006). Baginya, sistem ini “menjiplak” Orde Baru karena elit lokal telah belajar untuk mendominasi demokrasi dengan politik uang dan beragam instrumen serta mobilisasi dengan intimidasi politik. Perbedaan antara politik masa kini dengan masa Orde Baru adalah bahwa mereka sekarang hadir dalam atmosfer kompetisi, lebih cair, dengan—kadang-kadang—puncak kekuasaan yang kabur dan elemen-elemennya yang saling tumpang tindih (Hadiz 2003a). Hadiz juga menyebutkan bahwa diantara bekas elit Orde Baru yang saat ini memegang posisi-posisi kunci adalah birokrat tua yang berharap bisa mentransformasi kekuasaan birokrasi menjadi kepemilikan langsung atas kekuasaan politik. Aktor lainnya adalah pengusaha kecil-menengah yang berambisi memenangkan kontestasi politik dengan berafiliasi dengan organisasi-organisasi turunan Golkar misalnya HIPMI/ Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hadiz, 2010). Seluruhnya menghasilkan impresi bahwa politik masa kini didominasi oleh aktor-aktor bekas Orde Baru.

Namun penjelasannya yang konsisten tentang 'kepentingan predator', oligarki, dan demokrasi (i.e. Hadiz 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2010), tidak serta merta membuat ilmuwan lain pengguna pendekatan atruktural—dan perspektif campuran mendukung teorinya. Ryter (2009) dalam studi tentang paramiliter OKP (Organisasi Kepemudaan di masa Orde Baru) di Sumatera Utara mengkritik pendapat Hadiz tentang kekuatan lama yang sukses mereposisi dirinya dalam politik masa kini. Baginya, bertahannya organisasi paramiliter OKP dan fakta bahwa pemimpinnya berhasil memperoleh kursi di parlemen tak berarti bahwa negara "ditangkap" oleh "kekuatan lama". Namun, menurutnya, hal ini karena struktur kunci dan elemen ideologis yang telah terkonsolidasi selama berpuluh tahun bisa menyesuaikan diri dengan politik, asumsi tertentu tentang apa dan bagaimana seharusnya politik dan bagaimana model berbicara dan berperilaku secara politik (Ryter 2009 p. 183).

Terkait isu predatory interest, Aspinall dan van Klinken dalam kajian mereka tentang negara illegal (state illegality) mengatakan bahwa korupsi dan hal-hal illegal lainnya tetap dipraktikkan oleh negara dan oknumnya karena mereka menjalankan fungsi tertentu di masyarakat. Daripada menghubungkannya dengan rezim lama yang telah tumbang, Aspinall dan van Klinken lebih menyoroti pilihan rasional aktor, kewajiban kultural yang rumit, pengaruh dari zaman pra kolonial, desain institusi negara pradator, atau strategi kompetisi antar aktor (Aspinall & van Klinken 2011, p.2-11). Van Klinken dalam analisisnya tentang sistem patronase dan gagalnya demokrasi di Indonesia juga mengatakan bahwa sistem semacam ini telah ada jauh sebelum dan akan terus setelah New Order, karena telah melekat dalam relasi sosial dan bisa bertahan dalam era politik yang berubah-ubah. Jika hari ini ada kecenderungan bahwa elit local cenderung memanipulasi aturan demi tercapainya kepentingannya daripada memotong mesin demokrasi, hal ini karena mereka memainkan peran sebagai patron untuk banyak klien dari kalangan miskin demi mendapatkan dukungan dari mereka (van Klinken 2009,

h. 143, 155-6). Sementara itu, Aspinall, dalam kritiknya terhadap Hadiz dan Robison juga meyebutkan bahwa fokus pada keberlanjutan kekuasaan kelas dan kekuasaan negara—terutama yang terkait dengan merebaknya dan berlanjutnya korupsi dan patronase—tidak lah cukup. Sebaliknya, perlu analisis kelas yang lebih luas untuk bisa melihat tindakan dan kepentingan dari kekuatan kelas menengah dan bawah (Aspinall 2013, h. 226; 230).

Studi lain oleh Hidayat & van Klinken di Jambi dan Bengkulu juga menunjukkan relasi yang kompleks antara 'kepentingan predator' elit dan demokrasi. Menurutnya, demokrasi justru memfasilitasi korupsi, sebagian karena demokrasi mengundang persekongkolan (allegations), dan membuka kesempatan untuk korupsi sebagai konsekuensi dari kebutuhan finansial. Sebagaimana Thailand, politik lokal di Indonesia sering menunjukkan kombinasi dominasi antara birokrat dan kepentingan bisnis dalam bentuk pembelian suara dan kleintalisme politik (Hidayat & van Klinken 2009, h.149). Mereka juga percaya bahwa 'kepentingan predator' ada bukan karena aktor-aktor lama yang masih bertahan tetapi karena aktor baru mencoba membayar hutang politik pada pendukungnya. Di Jambi, kolusi antara pengusaha, gubernur, dan ketua DPRD di balik proyek pemerintah untuk membangun area rekreasi dirumorkan karena bupati membalas hutang politik ke para kontraktor yang saat pilkada memberikan dukungan untuknya. Termasuk, kemudian, adalah suap dari kontraktor kepada ketua DPRD. Di Bengkulu, gubernur juga memberikan kemudahan pada perusahaan tambang untuk masuk ke hutan lindung, lagi-lagi atas dasar membayar hutang politik kepada pengusaha pendukungnya saat kampanye. Pembukaan lapangan kerja dari perusahaan tersebut di kantong-kantong pendukungnya juga membantu sang gubernur memenuhi janji kampanye kepada pemilihnya (Hidayat & van Klinken 2009).

Selanjutnya, penjelasan tentang cacatnya demokrasi di Indonesia juga dijelaskan dengan perspektif aktor. Survei Demos tahun 2007 di 33 provinsi di

Indonesia menunjukkan bahwa masalah demokrasi di Indonesia bersumber dari dominasi elit berkuasa. Secara umum, riset ini membenarkan adanya elit berkuasa yang berasal dari Orde Baru telah menyandera demokrasi. Namun riset ini juga menyebutkan bahwa lemahnya institusi demokrasi dan kapasitas masyarakat; monopolisasi perwakilan; juga karena ketiadaan upaya substantive untuk mendukung representasi demokrasi langsung melalui representasi lokal dan organisasi rakyat/ populer (Törnquist 2009a h.9-11). Singkatnya, hal tersebut terjadi karena lemahnya representasi rakyat (*weak popular representation*), dimana di satu sisi ada kemerdekaan, tatanan hukum dan governance meningkat, tetapi relasi politik demokratis antara negara dan masyarakat masih sangat rendah (Törnquist 2009a; 2009b).

Beberapa studi tentang *local bossism* juga menunjukkan pentingnya melihat kapabilitas aktor dalam berpolitik. Penelitian tentang dinasti politik *jawara* di Banten menyoroti peran aktor dalam menghasilkan praktik yang tak demokratis. Kemampuan agen dan aspek personal-tradisional menjadi factor kunci dari keberhasilan mereka menguasai aspek-aspek informal dari pemerintahan dan menghasirkan kekuasaan dinasti di tingkat lokal (Pratikno & Kurniawan, 2010). Sumber kekuasaan mereka yang terakumulasi selama masa otoritarian tidak membuat mereka dianggap sebagai terkooptasi oleh rezim Suharto melalui bisnis, politik, atau lainnya. Namun, dipandang sebagai keberhasilan mereka dalam menegosiasikan kepentingannya dengan rezim. Factor kesempatan pasca reformasi pun tidak dilihat sebagai factor yang paling menentukan kesuksesan mereka. Sebaliknya, ini hanya dilihat sebagai faktor pendukung saja (Bandiyah, 2008).

Meski begitu, riset dari pendekatan aktor sangat sering dibantah oleh pendekatan struktural. Kaitannya dengan *jawara* di Banten, fakta bahwa organisasi mereka ditransformasikan oleh Orde Baru dan bahwa mereka mendapatkan keuntungan ekonomi karena relasi dekatnya dengan rezim tersebut tak bisa diabaikan sebagai faktor struktural. Sumber

kekuasaan dari negara dan kemampuan menggunakan kekerasan tradisional harus dilihat sebagai aspek penting yang menjadikan mereka sukses dalam memonopoli politik dan bisnis (Masaaki & Hamid 2008; Hakim 2011). Dalam studi yang lebih luas, Sidel mengkritik temuan Migdal tentang orang kuat di dunia ketiga, juga menyarankan pentingnya melihat faktor struktural ketika menganalisis aktor kuat di daerah. Sidel mengusulkan pentingnya melihat struktur negara, termasuk kesempatan untuk mengakumulasi dan memonopoli kekuasaan politik dan ekonomi yang disediakan oleh struktur negara (Sidel 2009 p.73). Khusus untuk Sumatera Utara (Medan), ia berpendapat bahwa kemunculan 'mafia lokal'tak bisa dilepaskan dari konteks pertumbuhan industri dan eksploitasi sumberdaya alam (Sidel 2009 p. 72). Argumen ini berseberangan dengan Migdal dalam hal melihat kesuksesan aktor dalam menempatkan dirinya dan keluarganya dalam posisi-posisi penting di pemerintahan sehingga mampu mengambil kontrol atas alokasi sumber-sumber keuangan negara. Mengenai jaringan struktur masyarakat, mereka menikmati pengaruh penting dari pemimpin negara dan birokrat lokal (Migdal 1988 in Sidel 2009).

Apapun penjelasan tentang penyebab dari masalah demokrasi di Indonesia, para ilmuwan sosial sepakat bahwa pasca 15 tahun reformasi demokratisasi tidak banyak membawa perubahan di tingkat lokal. Memtreang ada prospek yang baik seperti di Solo (Pratikno & Lay, 2013), Solok (World Bank 2006), Yogyakarta (UGM 2009), dan beberapa lainnya. Namun potret yang sebaliknya jauh lebih banyak. Dalam diskusi yang lebih luas penjelasan ini sejalan dengan diskusi tentang demokrasi yang rusak (*defective democracy*) yang menjelaskan bahwa penyebabnya tidak hanya masalah desain institusional dan *governability*, namun juga persoalan *nation-building*, serta alasan-alasan sosial ekonomi lainnya seperti halnya sejarah kolonial dan kultur politik (Croissant, 2004). Kilasan tentang sejumlah studi di atas menunjukkan bahwa meskipun banyak ilmuwan berusaha

menjelaskan peran aktor tetapi hal itu sangat sulit dipisahkan dari diskusi soal konteks struktural. Itulah mengapa tulisan ini, sekalipun ingin menjelaskan tentang peran aktor namun tidak ingin meninggalkan aspek struktur.

B.2. Teori Struktur-Agen untuk Melacak Demokrasi yang Bermasalah: Bourdieuan untuk “melengkapi” Analisis Marxian

Apa yang salah dengan pilihan Hadiz untuk setia menggunakan perspektif Marxian dalam menjelaskan demokrasi yang bermasalah? Tentu tidak ada, kecuali bahwa hal itu telah membuatnya tidak menganalisis sesuatu yang bekerja secara mendasar di politik. Fokus Hadiz pada melihat struktur sebagai sesuatu yang konkrit dan berkaitan dengan materialisme (kapital ekonomi) saja menyebabkan ia melihat tindakan aktor secara terbatas sebagai hasil dari keberhasilan Orde Baru dalam memahat struktur dan mereposisi aktor-aktornya dalam sistem politik masa kini. Ia pun kemudian mengabaikan alasan yang paling mendasar dari aktor untuk mengikuti ataupun melawan struktur.

Tulisan ini dibuat untuk mengisi kekosongan penjelasan aktor dalam konteks struktural, membuktikan bahwa aktor maupun struktur sama-sama berkontribusi terhadap cacatnya demokrasi. Disini, aktor tidak akan dilihat sebagai aktor yang bekerja secara mekanis dalam politik, tetapi mereka memperhitungkan aturan struktur baik secara sadar maupun tak sadar; dan kemampuan mereka dalam mengkombinasikan hal itu akan menentukan keberhasilan mereka dalam memegang kuasa.

Sehubungan dengan itu, tulisan ini dibangun dengan arahan teori yang dibangun oleh Pierre Bourdieu tentang dualitas struktur dan agen. Alasannya, teori ini dibangun dengan berbasis pada kasus empiris yang digunakan untuk mengkritik perspektif struktural (terutama Marxisme), untuk membuktikan bahwa aktor tidak bekerja secara mekanik (dalam mengikuti ataupun melawan struktur). Sekalipun Bourdieu sangat mendukung keberadaan aspek struktural di balik tindakan aktor namun ia menekankan pada pentingnya

melihat logika aktor dalam menentukan tindakannya dan memperhitungkan implikasinya. Bourdieu tidak mengabaikan Marx sama sekali terbukti dengan penggunaan istilah “kapital”. Hanya saja, kapital baginya tidak semata kapital ekonomi tetapi juga kapital kultural, kapital sosial, dan kapital simbolik yang dalam situasi tertentu bisa bekerja sebagai “kapital politik”.

Teori Bourdieu pada dasarnya menggarisbawahi dua hal: (1) dualitas struktur (objektivisme) dan agen (subjektivisme/ aktor) yang *inherent* dalam semua praktik sosial; dan (2) keterkaitan (*interplay*) antara habitus, kapital, dan *field* (arena) yang menghasilkan praktik sosial (i.e. Bourdieu 1977, 1984, 1992). Dualitas struktur dan agen bisa dilihat pada semangat untuk menunjukkan peran aktor (subjektivisme) dalam struktur (objektivisme). Dalam teori ini, struktur diperlihatkan sebagai sesuatu yang abstrak ketimbang kongkrit sebagaimana dijelaskan dalam habitus, kapital, dan *field*. Ketiganya saling terkait guna memperlihatkan kompleksitas praktik sosial. Di habitus, keputusan aktor untuk mengambil tindakan kadang tidak disadari karena sesuatu telah menyatu (terstruktur) dalam dirinya dan masyarakatnya. Kapital, yang pada dasarnya adalah sumber kekuasaan—secara subjektif bisa diraih, diakumulasi, ditransformasi, dan digunakan oleh aktor—sangat tampak dalam relasi aktor di *field*, memperlihatkan sifat/karakter dari habitus/struktur. Sementara *field* yang juga bisa dimaknai sebagai arena kontestasi/ konteks dimana relasi kekuasaan dimainkan, juga memperlihatkan relasi antara posisi-posisi dan kekuasaan objektif forces yang dicirikan oleh kapital.

Di antara ketiga konsep tadi, habitus mungkin adalah yang paling rumit, setidaknya jika melihat definisinya yang sangat panjang dan rumit. Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai: “systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structure, that is a principle of generation and structuring of practices and representation which can be objectively “regulated” and “regular” without in any way being the product of obedience

to rules, objectively adapted to their goals without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary to attain them and, being all this, collectively orchestrated without being the product of the orchestrating action of a conductor". Juga: "source of series of moves which are objectively organised as strategies without being a product of a genuine strategic intention". Namun apa yang relevan disini adalah bahwa dalam praktik sosial strategi agen kadang bekerja tanpa disadari (*unreflective*) karena telah terstruktur, menyatu dalam dirinya/ masyarakatnya. Disini, habitus menunjukkan jejak struktural dimana kultur, kelas asal, status sosial, dan posisi dalam hierarki sosial bekerja sebagai 'determinan' (Haryatmoko 2003). Tetapi ini tidak berarti bahwa struktur secara mekanis memerintahkan tindakan. Struktur 'hanya' memediasi orientasi aktor, dan mediasi ini dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu yang telah terbentuk secara sosial dan historis (Bourdieu 1977 p. 95). Karena itu aktor tetap memiliki peluang untuk menunjukkan subjektivitasnya dalam bertindak, meskipun tindakannya terbatas oleh kondisi-kondisi tertentu (struktur).

Penjelasan lain yang lebih mudah misalnya disediakan oleh Stokke and Selboe (2009) yang secara ringkas mendefinisikan bahwa aspek penting dalam dualitas struktur dan agen yang dimaksudkan oleh Bourdieu adalah bagaimana menstrukturkan struktur (*structuring structure*) dan struktur yang terstruktur (*structured structures*). Dalam struktur yang terstruktur, habitus merefleksikan sejarah dan situasi sosial yang telah terinternalisasi secara perlahan sebagai 'karakter', kebiasaan, atau *objectivity*. Menstrukturkan struktur berarti bahwa praktik yang telah terhabituasi (dianggap objektif) akan menghasilkan kepatuhan: praktik akan otomatis dijalankan tanpa perlu diorganisir/diperintah (Bourdieu 1992 dalam Stokke 2002). Praktik sosial menjadi spontan (*unreflective*), 'benar', dan menghasilkan kontinuitas serta keteraturan yang tak bisa dijelaskan oleh aktor (*unwitting regularity*). Hal ini juga menjadi sumber dari serangkaian tindakan yang secara objektif diatur sebagai 'strategi', motivasi, logika,

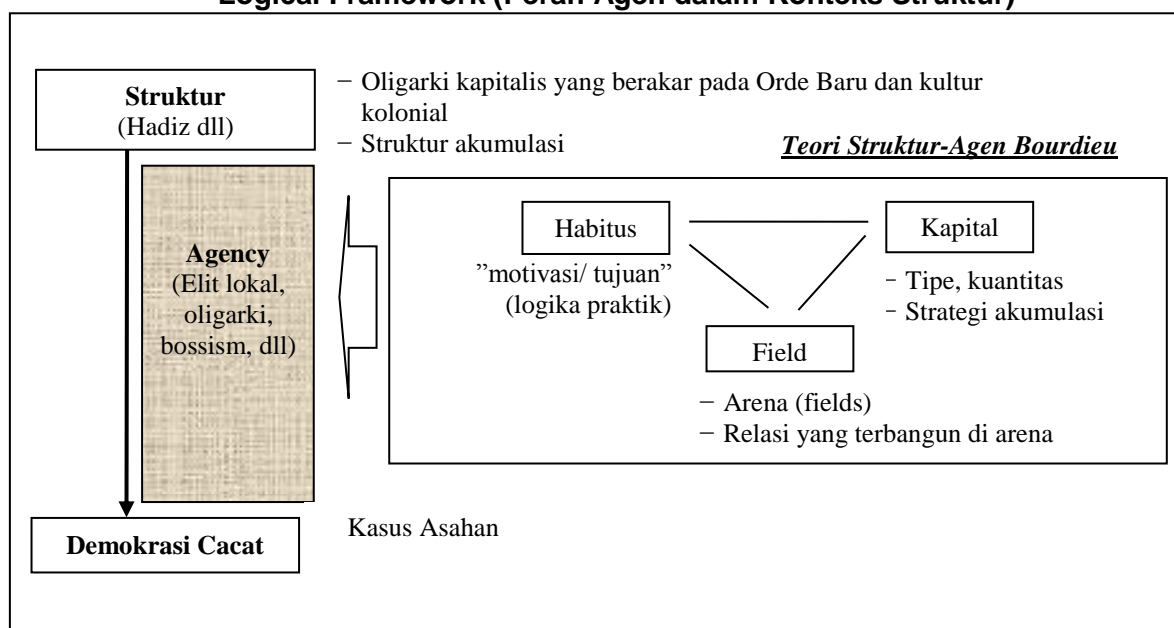
atau sesuatu yang dianggap sebagai rasional. Namun, respon aktor terhadap habitus bisa diikuti oleh kalkulasi strategis juga; kesadaran penuh bahwa apa yang ia lakukan adalah berbeda dengan habitus umum yang bekerja di lingkungan sosialnya. Dunia praktik sosial yang muncul dalam habitus, kemudian, bekerja sebagai sistem kognitif dan struktur motivasi (Bourdieu 1977).

Dimensi lain yang mencirikan teori Bourdieu adalah kapital, sumber kekuasaan yang dibutuhkan agen/ aktor untuk meraih dominasi kekuasaan. Sedikit berbeda dengan konsep tentang sumber kekuasaan yang dijelaskan oleh teori lainnya, Bourdieu mendefinisikan kapital dalam beragam bentuk sehingga memungkinkan identifikasi yang lebih tajam termasuk transformasi kapital—baik kapital ekonomi /kekayaan material, kapital kultural/ asset dalam bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi, ketrampilan, dan pendidikan, serta kapital sosial/ jaringan (Stokke, 2002)—bisa menjadi kapital simbolik yang secara efektif digunakan untuk meraih dominasi (Bourdieu 1977, Stokke & Selboe 2009).

Sementara itu *field* secara cepat bisa diartikan sebagai konteks tertentu dimana praktik sosial bekerja. Praktik merupakan produk dari habitus namun juga produk dari relasi antara habitus dengan konteks tertentu (Thompson 1991 dalam Stokke 2002), tergantung dimana posisi dan kekuatan aktor (relasi kuasa) muncul, dimana permainan, pemain, dan strategi bekerja. Posisi agen di arena kontestasi kapital ini ditentukan oleh akumulasi kapitalnya. Disini, *field* adalah arena untuk kompetisi kapital yang kadang memunculkan konflik.

Pertanyaannya, bagaimana mengaitkan antara studi-studi tentang demokrasi yang bermasalah dengan Bourdieu? Seperti disebutkan, konsep Hadiz tentang *old predatory interests* diasumsikan sebagai produk dari perspektif struktural; studi lainnya merupakan produk dari beragam perspektif; dan tulisan ini mencoba menganalisis masalah demokrasi melalui perspektif struktur-agen (lihat bagan).

Gambar 9.1
Logical Framework (Peran Agen dalam Konteks Struktur)



Tulisan ini, oleh karenanya dimaksudkan untuk mengisi penjelasan yang hilang (*“missing link”*) antara aktor dengan struktur. Aktor dalam tulisan ini adalah agen: aktor yang menjalankan segala sesuatunya berdasarkan kalkulasi strategis. Untuk konteks kajian ini, aktor atau agennya adalah: bupati, birokrat—atas, menengah, dan bawah --, politisi, dan *civil society* (aktivis dan jurnalis lokal).

B.3. Kasus Asahan: Arena Politik dan Ekonomi yang Saling Bertautan Sepanjang Sejarah

Kabupaten Asahan Sumatera Utara memiliki wilayah yang sangat luas mencakup 371,945 ha atau 5 kali lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta namun hanya dihuni oleh sekitar sepersepuluh dari penduduk Jakarta. Beribukota di Kisaran, perekonomian Asahan telah lama bergantung pada bisnis perkebunan. Di masa awal perkembangannya (masa kolonial) daerah bahkan menjadi salah satu kawasan penting dalam Sabuk Perkebunan Sumatera Timur/ Utara (Stoler 1995, Buiskool 2005). Bisnis ini pun bertahan hingga sekarang terbukti dari penggunaan lahan untuk perkebunan—terutama sawit—hingga total mencapai 65% dari seluruh area daratan (243,173 ha), atau 11.36% dari seluruh wilayah perkebunan di Sumatera Utara yang sangat luas. Bisnis

ini pun memunculkan aktor-aktor penting seperti perusahaan perkebunan negara dan swasta, termasuk juga individu untuk bertarung di politik sehari-hari. Dalam bisnis perkebunan ini, perkebunan negara (PTPN) menempati urutan pertama perusahaan terbesar di kawasan ini. Sementara itu Bakrie Sumatra Plantation (BSP)—owned by Abu Rizal Bakri, salah satu orang terkaya dan petinggi Partai Golkar di Jakarta—menjadi perusahaan swasta terbesar di kawasan ini.

Di balik sukses bisnis perkebunan, Asahan diam-diam menggantungkan perekonomiannya pada uang negara. Ketergantungannya terhadap transfer pemerintah pusat mencapai 92.97% dari total pendapatan, termasuk 69.77% dari transfer pemerintah pusat dan 23.20% yang dialirkan melalui provinsi. Uang yang banyak ini pun menghasilkan sumber keuangan lain selain perkebunan, sekaligus menciptakan struktur peluang bagi korupsi, setidaknya menurut semua informan dalam penelitian ini. Aktor lain yang bekerja dalam lingkaran pemerintah pun bisa menikmati keuntungan dari proyek-proyek pemerintah. Misalnya saja: para kontraktor, organisasi sosial yang bekerja untuk mendukung proyek-proyek non fisik, aktivis yang memperoleh uang dari pejabat kabupaten, pelobi anggaran, dll. Meski demikian, Asahan juga masih

memiliki banyak penduduk yang tak bisa meraih sumber kesejahteraan tersebut dan akhirnya hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan statistik daerah tahun 2012 jumlah mereka mencapai 10,52% (sekitar 71.000 orang). Kondisi ini membuat sektor ekonomi kecil/ mikro seperti pasar tradisional menjadi penting. Sektor ekonomi alternatif ini pun kemudian bisa digunakan sebagai 'alat' dalam permainan politik.

Kilasannya mengenai karakter ekonomi Asahan sangat penting tidak hanya sebagai latar belakang bagi banyak isu publik namun juga untuk menjelaskan struktur atau konteks yang menghasilkan "logika bisnis atau ekonomi"; hasil dari persinggungan antara arena ekonomi dan politik. Bagaimana kilasannya?

Meruntut pada sejarah kolonial, Asahan dibangun oleh aktor ekonomi yang merambah arena politik. Aktor ekonomi (perusahaan perkebunan swasta Belanda) saat itu mendapatkan 'izin' dari otoritas politik (pemerintah kolonial) untuk menciptakan struktur baru masyarakat: memobilisasi penduduk dari luar Sumatera—terutama Jawa yang kemudian menjadi penghuni terbesar kawasan ini—dan menciptakan sejumlah aturan sosial bagi pekerja dan masyarakat (Stoler 1995). Aktor ekonomi ini juga mengenalkan birokrasi modern yang korup dan sistem kekuasaan yang mampu menaklukkan pemimpin tradisional dan rakyatnya; hingga menghasilkan masyarakat yang tak berakar, tunduk, namun sekaligus korup (Reid 1979, Stoler 1995). Bisnis perkebunan pun menghadirkan hasrat ekonomi yang berlebihan bagi semua kelompok aktor: kerajaan, pegawai dan pejabat perusahaan dan pemerintah yang mempraktikkan birokrasi korup, pekerja dan penduduk kampung yang mencuri asset perkebunan; mengesankan bahwa *rent seeking* sejak awal telah dikenal luas dan dipraktikkan beramai-ramai oleh semua kalangan. Di awal kemerdekaan, pertautan antara kedua arena berlanjut. Di masa Sukarno penguasa politik berpindah dari aktor ekonomi ke aktor negara; menghasilkan "penjarahan" tanah perkebunan yang direstui negara; juga nasionalisasi perkebunan asing menjadi PTPN (PT. *Perkebunan Nusantara*)—

perusahaan perkebunan terbesar saat ini. Pada masa Suharto (1966-98) pertautan antara kedua arena makin kuat; salah satunya ditunjukkan dengan penguasaan asset-aset ekonomi oleh pejabat lokal.

B.4. *Rent Seeking dan Demokrasi: Kegagalan Aktor dalam Melawan 'Struktur Abstrak'*

Sebagaimana kilasan di atas, riset ini menemukan bahwa konsep kekuasaan di Asahan sejak lama diletakkan di atas rekognisi yang berlebihan terhadap kapital ekonomi dan status; hingga keduanya menjadi "alat dan strategi terpenting" (kapital simbolik) juga "motivasi" (habitus) para aktor politik dan demokrasi. Bertahannya karakter ekonomi dan politik yang relative sama dari masa ke masa tanpa dibarengi oleh kehadiran 'pengetahuan' lain—misalnya demokrasi—yang cukup kuat harus diakui memberikan kontribusi terhadap rekognisi aktor yang berlebihan terhadap kapital ekonomi dan status. Hal-hal yang kemudian menyebabkan demokrasi menjadi bermasalah. Demokrasi, bagi aktor-aktor di Asahan hanya bekerja sebagai alat yang mendukung kompetisi kapital simbolik di arena politik. "Kesepakatan" tentang kapital simbolik membuat *rent seeking* dalam politik sehari-hari bisa diterima dengan baik. Jika ada "pergolakan" atau indikasi awal demokrasi, semata-mata merupakan efek dari persaingan aktor dalam memelihara atau mengakumulasi kapital yang seringkali melibatkan praktik *rent seeking* di dalamnya.

Dalam kasus penutupan akses informasi publik misalnya melalui Surat Edaran Bupati misalnya. Sekalipun surat ini tidak secara eksplisit memerintahkan birokrat untuk tidak memberikan informasi apapun kepada publik namun dipatuhi dengan sangat. Dari semua diskusi dengan narasumber aktivis dan birokrat, surat ini diduga menjadi upaya bupati untuk melindungi praktik dan jaringan *rent seeking* yang telah memfasilitasinya untuk meraih kapital simbolik dan kekuasaan. Mukhlis Bela, aktivis lokal, menuturkan bahwa T.G. Simatupang, sang bupati, mencoba menutupi korupsi yang meluas dalam pemerintahannya, termasuk alokasi anggaran untuk aparat keamanan.

Sementara itu, dukungan penuh dari birokrat dan anggota DPRD terhadap kebijakan ini juga terkait dengan ketakutan akan kehilangan kapital simbolik (ekonomi dan status) yang biasanya akan diperoleh melalui “pe- *non job-an*” (Istilah lokal untuk birokrat/pegawai negara yang tidak dimutasi, tidak diberhentikan, namun dihukum secara sosial dan politik: tetap digaji tanpa boleh melakukan apapun, tidak bisa melakukan ‘aktivitas ekstra’ (rent seeking) dan dijauhi oleh kolega di kantornya) atau mutasi yang tak menguntungkan secara finansial. Dukungan mereka untuk menutup informasi kepada publik juga terkait dengan rasa aman mereka karena terhindar dari pemerasan dari aktivis yang berbasis pada informasi anggaran.

Sebagai catatan pemerasan semacam ini marak di Asahan karena para aktivis muda yang tengah mencari alternatif pekerjaan yang tanpa suap ‘gemar’ menggertak pejabat. Mereka biasanya mengintimidasi dan memeras pejabat yang diyakini melakukan korupsi dengan ancaman membuka skandal korupsi kepada publik sehingga berpeluang kehilangan jabatan (status) dan peluang *rent seeking* yang melekat dalam jabatan.

Dalam kasus Program Imtaq, penutupan informasi tentang program ini juga ditengarai berkorelasi dengan kepentingan aktor (pengurus yang kebetulan beraviliasi dengan partai--PKS) untuk menjaga kapital simbolik (kapital ekonomi dan status) melalui ketertundukan pada bupati. Padahal kebijakan ini kontroversial karena menggabungkan syarat ekonomi (masyarakat miskin) untuk memperoleh bantuan dari negara (pemerintah daerah) dengan penilaian negara terhadap keimanan yang bias Islam.

Sementara dalam kasus pasar tradisional (kasus Air Joman) ‘nuansa bisnis’ tampak di belakang kasus pemerasan oleh birokrat level bawah ke pedagang yang berkorelasi dengan kepentingan birokrat menengah dan atasan guna mempertahankan “performa kerja”. “Performa” yang dalam keterangan seluruh informan riset terkait dengan nilai setoran uang dan kesetiaan secara berjenjang. Nuansa serupa juga disebutkan mewarnai

rentetan demonstrasi yang panjang yang dipimpin oleh para aktivis (selengkapnya lihat naskah tesis). Selanjutnya, jikalau kemudian bupati bersedia menemui demonstran dan mencari jalan keluar masalah, hal tersebut juga dikaitkan dengan kepentingannya untuk mempertahankan nama baik (status) yang bisa rusak karena demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan jatuhnya korban sakit.

Sementara itu dalam kasus Pasar Inpres, logika ekonomi juga bekerja di belakang rumor tentang keterlibatan pemda dalam membakar pasar, motivasi para pedagang korban dalam menyuarakan aspirasinya dan motivasi para pemilik ruko yang dirugikan dengan keberadaan pasar darurat untuk protes—namun kemudian menerima kebijakan ini. Disini, logika status lebih kuat. Bupati bisa jadi memilih lokasi berdasarkan agenda personalnya untuk menundukkan aktivis yang keras kepala yang kebetulan menjalankan usaha di salah satu ruko—upaya mematikan kehidupannya sebagai bentuk tekanan. Kecemburuan sosial pedagang pasar terhadap pemilik ruko dimanfaatkan untuk mengikuti keinginan mereka memperoleh pasar pengganti di lokasi terdekat dengan pasar yang terbakar, yaitu di tengah jalan raya dimana jejeran ruko ada di kanan-kiri jalan. Lagi-lagi ketiadaan keuntungan financial dan keuntungan status membuat para aktivis secara umum membiarkan permasalahan ini terjadi.

Dalam kasus rebutan lahan eks perkebunan Bakrie Sumatra Plantation (BSP). Kecurigaan bahwa aktor-aktor pemerintahan tengah membidik asset negara yang dikembalikan oleh BSP membuat segelintir aktivis memobilisasi masyarakat, namun dengan iming-iming tanah untuk rakyat. Gerakan ini pun diruntuhkan oleh pemerintah yang ganti mengiming-imingi para angora gerakan dengan rumah sederhana sementara bagi aktivis yang telah mengancam kepentingan ekonomi dan status pemda/ bupati merespon dengan keras.

Dalam field, pemda—dalam hal ini bupati—muncul sebagai aktor yang terkuat karena memegang kendali atas sumberdaya politik (kapital simbolik): uang

negara dan status (jabatan). Situasi ini yang menyebabkan semua aktor—baik aktor lama maupun baru bersaing untuk mendapatkan posisi di lingkaran pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewarnai politik sehari-hari tidak muncul karena aturan permainan hanya disepakati oleh para aktor berupa rekognisi atas kapital/ kesejahteraan ekonomi dan status.

Hingga sekarang, aktor-aktor di Asahan merasa tidak perlu mengganti aturan main dalam politik yang menyertakan rent seeking, termasuk tidak tertarik pada hal-hal baru seperti demokrasi sekalipun mereka sering terganggu dengan “aturan lama” tersebut. Selanjutnya, kompetisi kapital juga melahirkan kekerasan karena tidak dibarengi dengan kontrol yang benar terhadap proses demokrasi. Disini struktur yang bekerja pada level abstrak menjadi “salah” karena semata-mata diletakkan pada penghargaan yang berlebihan terhadap kapital simbolik (yang berasal dari kapital ekonomi).

Melihat bagaimana aktor bekerja dalam 5 situasi politik di Asahan tampak bahwa struktur bagi aktor di Asahan adalah pandangan mereka terhadap kapital ekonomi dan status yang bekerja sebagai kapital simbolik dan habitus umum. Konsekuensinya, kapital ekonomi dan status dianggap sebagai alat sekaligus motivasi politik yang paling penting; struktur abstrak yang melandasi semua bangunan relasi politik antar aktor sekaligus bangunan politik sehari-hari.

B.5. Rent Seeking dan Rusaknya Demokrasi: Kegagalan Aktor dalam Melawan “Struktur Abstrak” yang Bertahan Lama

Keseluruhan analisis tentang Asahan menunjukkan bahwa rusaknya demokrasi di Asahan disebabkan oleh keengganan aktor untuk meninggalkan “struktur abstrak” yang telah lama terbangun. Alasan bahwa struktur abstrak masuk akal tidak menyurutkan niat mereka untuk memelihara ini walaupun banyak diantara mereka yang telah terganggu dengan sejumlah aturan struktur (misalnya suap untuk memperoleh pekerjaan). Mereka bahkan menggunakan aturan tersebut sebagai logika untuk melawan

struktur yang sama (demonstrasi yang selalu mengangkat isu korupsi pejabat). Ketiadaan pengetahuan yang beragam membuat semua aktor percaya bahwa hanya ada dua hal yang bisa digunakan untuk meraih “tujuan” (habitus): kapital ekonomi dan status.

Hasilnya, kelompok aktor yang sebelumnya tidak dikenal sebagai pemburu rente—misal birokrat menengah dan bawah serta aktivis—sekarang teridentifikasi sebagai aktor baru pencari rente. Tetapi mereka bukan menjiplak perilaku atasan saja, namun dalam banyak hal but mereka mencoba melawan struktur. Misalnya pernyataan seorang birokrat bahwa ia melakukan korupsi kecil-kecilan karena berkali-kali harus menunjukkan kesetiaan pada atasan (agar tidak kehilangan kapital dan status) dengan cara berhutang demi menutup anggaran yang dipergunakan secara tidak bertanggungjawab oleh atasan. Atau aktivis yang melawan struktur korupsi dengan cara korupsi. Upaya aktor untuk melawan struktur—walaupun gagal dan bersifat sementara—pada level yang terbatas harus diakui mampu menghasilkan perlawanan, juga kritik dan kontrol terhadap pemerintah lokal. Tetapi, kegagalan mereka untuk menanggalkan struktur abstrak juga harus diakui sebagai penyebab dari buruknya demokrasi di Asahan.

B.6. Bukan Aktor yang Lama tetapi Ketertundukan Aktor pada Konsep Lama “Struktur Abstrak”

Rekognisi aktor terhadap kapital ekonomi dan status baik sebagai kapital simbolik maupun habitus mungkin tidak lah buruk. Tetapi ini tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi karena mendorong oportunisme politik dalam politik sehari-hari. Ketika pembuatan kebijakan, kritik dan monitoring terhadap pemerintahan diletakkan pada rekognisi kapital simbolik sebagaimana dijelaskan di atas maka menghasilkan demokrasi yang cacat, bahkan “patronase” dan sistem rotasi aktor yang cepat.

Sistem patronase—jika bisa disebut demikian—lemah karena aktor tak bisa memenuhi permintaan ‘klien’ yang terus menerus akan kapital ekonomi dan

pemberian status. Karena rekognisi terhadap kapital simbolik ini sangat kuat, aktor yang menginginkan kekuasaan harus menyediakan kapital simbolik secara terus menerus, juga menyediakan diri untuk beragam permintaan yang tiba-tiba (misalnya menghadapi pemerasan); semua ini karena para aktor yang “kreatif” dalam mencari celah “bisnis” dalam politik sehari-hari—bukan dalam pemilu lima tahunan.

Aktor yang mampu menyediakan kapital simbolik “hanya” mendapat rekognisi sebagai pemilik atau penyedia kapital simbolik saja, namun tidak sampai pada karisma. ‘Klien jangka pendek’ hanya menghormati dan loyal pada ‘patron’ sepanjang kepentingan mereka akan kapital simbolik bisa dipenuhi. Sistem ini, oleh karenanya, tidak menghasilkan respek sejati dari ‘klien’ terhadap ‘patron’; namun ‘kompetisi’. ‘Patron’ biasanya menggunakan status (kuasa) untuk menunjukkan kekuasaannya; namun hal itu justru memancing ketidaksukaan dari aktor lain.

Situasi ini menghasilkan kesempatan besar untuk rotasi aktor. Karena itu tidak mengherankan apabila DPRD Asahan saat ini didominasi oleh aktor baru, yaitu sekitar 70% (Sinar Indonesia Baru July 5th, 2009). Kehadiran politisi baru ini memperlihatkan bahwa menggantikan kekuatan politik lama bukan hal yang mustahil. Rekognisi yang berkelanjutan terhadap struktur lama—dalam hal ini adalah aturan main berdasarkan struktur abstrak—membuat aktor baru tidak bisa menggantung pada profesionalisme atau bahkan kepemilikan kapital simbolik dalam konsepsi lama. Beberapa pemegang posisi strategis di DPRD dianggap memiliki kemampuan yang rendah namun ia didukung oleh harta keluarga yang banyakyang telah dibangun sejak masa Orde Baru. Tapi banyak anggota DPRD lainnya didukung oleh kemampuan untuk mengkombinasikan syarat prosedur pemilu (kapital kultural) dengan kapital ekonomi atau status; kecenderungan baru pasca 1998.

Logika yang sama membuat banyak aktor lama kehilangan posisi di politik masa kini. Karena sumberdaya kekuasaan melekat pada negara, sekali

aktor kehilangan posisi, ia akan segera menghilang dari politik. Selanjutnya, satu-satunya aktor lama yang bertahan adalah T.G. Simatupang, sang bupati. Eksistensinya pada politik masa kini bukan karena keterkaitannya dengan Orde Baru. Tapi lebih karena dia satu-satunya aktor lama yang lihai bermain kapital simbolik. Ia menggunakan posisinya sebagai anak dari bupati lama dan birokrat senior. Terlepas dari langkah-langkah politiknya yang ilegal, sistem pendukung yang bagus dan kesan umum padanya sebagai bupati yang semena-mena—dalam istilah para responden adalah diktator—namun ia berhasil dalam memanfaatkan struktur dan ketertundukan aktor lain terhadap struktur (kapital simbolik dan habitus) sehingga menghasilkan ketertundukan kepada dirinya.

B.7. Protes dan “Aktivisme dengan Pemerasan”

Seperti disebutkan, kompetisi kapital telah mendorong sejumlah aktor yang tengah mengejar kapital untuk memeras mereka yang memiliki banyak kapital simbolik (uang dan status); memaksa mereka untuk membagi kapital ekonomi/ akses untuk memperolehnya dengan cara mengancam akan mengumumkan skandal korupsi mereka kepada publik atau melaporkan kepada pihak berwajib. Mereka melakukan itu (melaporkan, demonstrasi, mengumumkan) tidak dalam rangka mengontrol korupsi, tetapi lebih kepada untuk meningkatkan status mereka sebagai “aktor penting yang berbahaya” yang perlu ditundukkan dengan dikooptasi (ditawari dengan keuntungan material atau direkrut menjadi birokrat).

Mereka melakukan hal itu karena struktur dipahami sebagai: (1) konsep lokal tentang kapital simbolik—sesuatu yang dalam beberapa hal telah dirasa membebani; (2) ada kelompok aktor yang menguasai kapital simbolik. Bagi aktivis, para aktor ini harus dikejutkan, diancam, diganggu karena mereka adalah penguasa kapital simbolik yang paling nyata. Mengganggu pemilik kapital simbolik adalah upaya nyata untuk mengganggu konsepsi umum tentang kapital simbolik; sehingga memungkinkan mereka untuk

mengakses kesempatan kerja—dikooptasi dalam lingkaran pemerintahan—tanpa perlu menyediakan uang sogokan (kapital ekonomi) untuk memperoleh pekerjaan. Jika saat ini para aktor baru (aktivis) ini menggunakan beberapa alat demokrasi (demonstrasi, protes), mereka melakukan itu semata-mata karena mereka tahu bahwa ‘taktik’ semacam ini telah dikenal luas sejak reformasi sebagai taktik yang efektif yang digunakan oleh kelompok mahasiswa/ kaum terdidik yang dihormati untuk menumbangkan Orde Baru. Mereka membayangkan bahwa hal serupa bisa digunakan secara efektif untuk Asahan (menggertak). Demikian juga, korupsi digunakan oleh para aktivis karena: (1) isu ini populer di seluruh penjuru tanah air sebagai strategi untuk menggerus status dan kapital ekonomi pejabat; (2) korupsi juga banyak dipraktikkan di lingkaran pemerintahan—bahkan dianggap sebagai kebutuhan, sehingga ada banyak kasus yang bisa diangkat karena dua alasan tersebut.

B.8. Civil Society yang Lemah dan Bertahannya Institusi Korporasi Negara Orde Baru

Semua logika politik yang dibangun di atas rekognisi aktor terhadap kapital ekonomi dan status membawa efek signifikan bagi potret demokrasi Asahan. Di satu sisi ini mendorong aktor untuk kritis pada pemerintah, menghidupkan dinamika politik; namun pada sisi yang lain harus diakui sebagai mengurangi kualitas demokrasi, bahkan membuatnya menjadi memprihatinkan. *Pertama*, hal ini berkontribusi terhadap lemahnya civil society. Kompetisi antar aktivis adalah riil. Mereka memang sering bekerja sama, tetapi lebih sering berkomeptisi dalam ‘bisnis politik’. Meski mereka berkolaborasi, tetapi semua berdasarkan kalkulasi strategis atas potensi keuntungan ekonomi dan status di balik isu politik dan kebijakan. Mereka lebih suka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, atau bahkan secara individual karena mereka mengincar kapital yang sama. Mereka enggan untuk membantu kolega sesama aktivis ketika tidak melihat potensi itu. *Kedua*, rekognisi yang kuat pada kapital ekonomi dan status menyebabkan institusi

korporatis negara yang dibangun oleh Orde Baru sebagai wadah kooptasi tetap hidup. Hari ini, puluhan organisasi ini tetap berdiri tegak di Asahan; kantor-kantornya sangat mudah ditemukan di jalan-jalan utama Kisaran. Organisasi-organisasi ini cukup terkenal terutama organisasi yang bergerak di kepemudaan dan pekerja perkebunan. Fakta bahwa aktivis muda mengincar jabatan penting di organisasi semacam ini mengesankan bahwa Orde Baru tetap hidup dan mempengaruhi para aktor. Tetapi, menyimak secara hati-hati keterangan para informan riset ini, jelas bahwa para aktivis muda ini ingin masuk ke organisasi ini semata karena organisasi ini telah dikenal di pemerintahan, memiliki kepengurusan yang tertata sehingga bisa memfasilitasi mereka untuk meraih proyek-proyek pemerintah—dan kemudian kapital ekonomi dan status. Sekali lagi, mereka bukan memilih ini karena rekognisi terhadap Orde Baru.

Selain itu, tidak jelas siapa yang paling diuntungkan oleh kondisi ini. Jika organisasi semacam ini secara alamiah menjadi berguna bagi para aktor muda untuk meraih kapital simbolik, maka ini berarti juga berguna bagi aktor politik lain (i.e. bupati) maupun mungkin otoritas nasional. Sekalipun ada kekeburan tentang aktor yang paling diuntungkan, tetapi jelas bahwa setidaknya ada tokoh senior—wartawan senior—yang terlibat dalam mendekati para aktivis muda dan membawanya untuk masuk dalam organisasi ini (lihat tulisan penuh); bisa jadi tindakannya menguntungkan Simatupang, tetapi bisa jadi menguntungkan otoritas lain, misalnya pemerintah nasional. Bagi Simatupang, kondisi ini—aktivis dengan senang hati dan keinginan sendiri masuk dalam organisasi korporatis negara seperti KNPI, Karang Taruna, dll—menguntungkan karena akan memudahkan menjalankan pemerintahan tanpa gangguan aktivis. Bagi Simatupang yang mendapatkan didikan dari Orde Baru, kooptasi semacam ini akan menyediakan arena untuk menundukkan aktivis muda yang potensial mengganggu kapital simboliknya. Sementara bagi pemerintah pusat, demokrasi yang lemah demokrasi yang lemah mungkin ‘mendukung’ stabilitas politik Sumatera Utara. Asahan bagaimanapun juga punya

potensi konflik sosial dan politik yang besar, walau sampai hari ini nyaris tak pernah terjadi. Keberadaan aktor-aktor yang berpotensi ‘mengganggu pemerintahan’ namun ‘kebutuhan’ mereka untuk dikooptasi tentu menguntungkan stabilitas politik, mempermudah Jakarta dalam mengatur daerahnya yang terletak cukup jauh ini. Organisasi korporatis lama ini, oleh karenanya, merupakan investasi politik Orde Baru yang menguntungkan aktor berkuasa (bupati dan pemerintah nasional), yang telah juga berkembang secara ‘natural’ menjadi sarana yang menguntungkan aktor lain (aktivis muda) walaupun menghadirkan kerugian bagi demokrasi.

B.9. Membandingkan Temuan

Jika teori Bourdieu membawa penjelasan seperti di atas, lalu bagaimana jika dibandingkan dengan Hadiz? “Perbandingan” ini penting untuk melihat apakah kritik Bourdieu terhadap Marx juga bisa dijelaskan dalam kasus Sumatera Utara ini (kritik saya terhadap Hadiz). Perbandingan ini termasuk melihat sejauh mana penjelasan struktural Hadiz cocok dengan penjelasan struktural lain serta sejauh mana aspek agency bekerja dalam konteks struktural.

Harus diakui bahwa masalah demokrasi di Asahan—sebagaimana Hadiz—berkorelasi secara kuat dengan ‘*predatory interests*’; atau korupsi/ *rent seeking*. Tapi ada sejumlah perbedaan. Pertama soal Orde Baru. Tanpa bermaksud untuk menihilkan kontribusi Orde Baru yang sangat besar dalam menstrukturisasi daerah, saya berpendapat

C. PENUTUP

“Bagaimana kita memahami persoalan demokrasi di Asahan? Sebagaimana dijelaskan di atas, buruknya kualitas demokrasi di Asahan adalah karena semua aktor, termasuk aktor pro demokrasi gagal melawan struktur abstrak yang merujuk pada rekognisi yang berlebihan terhadap kapital ekonomi dan status; dua hal yang berakar dari tiga rezim: colonial, Orde Lama, dan Orde Baru.

Kasus ini oleh karenanya menunjukkan bahwa struktur bukan satu-

bahwa lebih penting melihat struktur dalam aspek abstrak daripada kongkrit. Sebab, aspek abstrak ini telah menjadi logika yang diadopsi oleh aktor sepanjang sejarah Asahan dan berkontribusi terhadap potret demokrasinya. Melihat sejarah Asahan, sangat jelas bahwa “struktur abstrak” yang ada saat ini merupakan produk dari tiga rezim kekuasaan: masa kolonial, Sukarno, dan Orde Baru (Suharto).

Kedua, dalam dualitas struktur dan aktor, jelas bahwa cacatnya demokrasi di Asahan merupakan konsekuensi dari kegagalan aktor melawan “struktur abstrak” yang dibangun di atas rekognisi berlebihan pada kapital ekonomi dan status yang sadar dan tak sadar terpelihara sepanjang sejarah. Kesadaran aktor untuk menggunakan dan memelihara logika (“struktur abstrak”) adalah karena pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Aktor lokal cenderung menyukai kondisi saat ini karena menganggapnya sebagai menguntungkan. Mereka hanya menentang sedikit aspek dari struktur karena mereka bisa memanfaatkannya sebagai taktik dan strategi untuk memperoleh kapital simbolik (materi dan status). Demokrasi—dalam makna universalnya—tak pernah muncul sebagai penyeimbang dari rekognisi lama ini. Karena itu aktor demokrasi (aktivis) kemudian “secara selektif” memilih aspek-aspek dari demokrasi yang bisa digunakan untuk mendukung agenda (habitus) mereka yaitu meraih kapital ekonomi dan status. Poin ini lebih kompleks daripada argumen Hadiz yang membayangkan aktor ‘sekedar’ mereplikasi Orde Baru.

satunya kontributor bagi potret demokrasi saat ini. Namun memang kontribusi aktor terhadap kondisi ini tak bisa dipisahkan dari rekognisi mereka terhadap “struktur abstrak” yang berkorelasi dengan karakter ekonomi dan politik yang tak pernah berubah. Kuatnya habitus dan kapital simbolik yang muncul dalam beragam bentuk praktik *rent seeking* tak bisa dipisahkan dari fakta bahwa Asahan seumur hidupnya terjebak dalam karakter *filed* yang sama. Fakta ini, oleh karenanya, mendorong aktor untuk sadar dan tak

sadar memelihara logika 'bisnis dalam politik' (*rent seeking*) yang telah bekerja sepanjang masa. Kadang mereka menggunakannya secara sadar, namun kadang mereka menentang/ melawan untuk memenangkan atau memelihara posisi mereka dalam politik (kompetisi kapital). Sayangnya, mereka yang secara sadar menantang/ melawan "permintaan yang terstruktur" tidak menyadari bahwa mereka tengah menggunakan habitus yang sama, melakukan aktivisme dengan pemerasan (*blackmailing-activism*) yang justru tidak mendukung demokrasi. Perlawanan mereka terhadap struktur justru memperkuat lemahnya kontrol terhadap pemerintahan.

Kedua, konsep tentang struktur harus lebih luas ketimbang hanya terbatas pada Orde Baru. Penting untuk mempertimbangkan bahwa banyak daerah memiliki "struktur tradisional/ lokal yang tersembunyi" selama Orde Baru berkuasa. Jika Asahan yang tak memiliki "struktur tersembunyi" saja tidak terbukti menempatkan Orde Baru sebagai aktor terkuat yang membentuk pola politik masa kini, lalu bagaimana dengan daerah lain yang memiliki? Orde Baru memang tak diragukan sangat kuat tetapi tidak berarti bahwa sisa-sisa kekuasaannya masih bisa mengontrol logika politik lokal secara keseluruhan.

Lebih lanjut, sangat penting untuk melihat struktur dalam korelasinya dengan logika tertentu yang bekerja pada level lokal daripada melihat aktor lama (bekas aktor penting di masa Orde Baru). Mengganti aktor yang tak diinginkan jauh lebih mudah daripada membuang logika yang telah bekerja sepanjang sejarah. Harus ditekankan bahwa logika semacam ini (habitus umum dan kapital simbolik)

bekerja jauh lebih kuat dalam diri aktor; menjai basis berpikir untuk menentukan apakah mereka secara strategis akan mengikuti atau melawan struktur.

Kasus Asahan, oleh karenanya, memperlihatkan bahwa rusaknya demokrasi bisa disebabkan oleh aspek-aspek lama (logika yang terstruktur), namun juga aspek-aspek baru yang diciptakan oleh aktor-aktor masa kini sebagai hasil dari respon mereka terhadap aspek-aspek dari struktur lama yang mulai mengganggu mereka. Disinilah aspek agensi harus dilihat. Namun, walaupun para aktor tersebut masih 'terjebak' dalam logika lama tetapi mereka harus diakui sebagai upaya untuk melawan atau paling tidak memodifikasi struktur. Jika kasus Asahan memperlihatkan bahwa aktor baru tidak siap untuk menanggalkan aspek lama, hal ini karena ketiadaan pengalmana/ pengetahuan yang mampu menjadi alternatif bagi 'rasa aman secara material/ ekonomi' mereka. Aktor-aktor yang berpengalaman tetapi 'tak terikat' dengan Asahan (professional) mungkin diperlukan; mereka yang memiliki habitus berbeda, tak terkait dengan politik Asahan, tetapi secara kontinu mengenalkan wacana dan pengetahuan baru tentang demokrasi dan anti korupsi.

Akhirnya, *rent seeking* dalam politik tidak diragukan lagi terjadi sangat kuat di politik Indonesia. Tetapi, ada kesan bahwa praktik/ logika semacam ini bekerja terutama dalam "seremoni demokrasi" (pemilu). Padahal dalam kenyataannya, ia bekerja secara kuat dan konsisten dalam politik sehari-hari. Kasus Asahan, diharapkan dapat menstimulasi dilakukannya riset lain sejenis yang saya yakini terjadi di banyak daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. 2013. The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation. *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 43 No. 2, 226-242.
- Aspinall, E., & van Klinken, G. 2011. The State and Illegality in Indonesia. In E. Aspinall, & G. van Klinken (Eds.), *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Bandiyah. 2008. *Evolusi Jawara Di Banten (Studi Evolusi dari Bandit Menjadi Pejabat)*. Yogyakarta: Unpublished master thesis. Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada.
- Bayo, L. N. 2010. *Kuasa Adat atas Gereja dan Negara di Adonara*. Yogyakarta: Unpublished master thesis. Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada.

- Beetham, D. 2013. Retrieved from http://iis-db.stanford.edu/pubs/20433/Freedom_and_Rights.pdf
- Beetham, D. 2005. *Democracy: A Beginners' Guide*. Oxford: One world Publication.
- Bourdieu, P. 1984. *Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge Massachussets: Harvard University Press.
- Bourdieu, P. 1977. *Outline of A Theory of Practice, translated in 1977*, . Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. 1984. *The Logic of Practice*. Standford: Stanford University Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: the University of Chicago.
- BPS Asahan. 2012. *Asahan Dalam Angka 2012*. Kisaran: BPS Asahan.
- Buiskool, D. A. Medan: A Plantation City on the East Coast of Sumatra (1870-1942). In F. Colombijn, M. Barwegen, P. Basundoro, & J. A. Khusyairy (Eds.), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, Netherlands Institute for War Documentation, Jurusan Sejarah UNAIR.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches: Second Edition*. California: Sage Publication.
- Gaffar, A. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hadiz, V. R. 2003. Considering the Idea of 'Transition of Democracy' in Indonesia. In A. Priyono, S. A. Prasetyo, & O. Törnquist, *Indonesia Post Soeharto's Democracy Movement*. Jakarta: Demos.
- Hadiz, V. R. 2004. Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspectives. *Development and Change* , 35, 679-718.
- Hadiz, V. R. 2004. Indonesian Local Party Politics: A Site of Resistance of Neo-Liberal Reform. *Southeast Asia Research Centre Working Paper Series, No. 61* .
- Hadiz, V. R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Hadiz, V. R. 2003. Power and Politics in North Sumatera: the Uncompleted Reformasi. In E. Aspinnal, & G. Fealy (Eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratisation*. Singapore: ISEAS.
- Hadiz, V., & Robison, R. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The political oligarchy in an age of market*. London, etc.: Routledge.
- Hakim, A. 2011. Retrieved May 15, 2013, from <http://indonesiasynergy.files.wordpress.com/2011/11/jawara-and-political-dynasty-in-banten1.pdf>
- Haryatmoko. 2003. Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Geraan Sosial Menurut Pierre Bourdieu. *BASIS No. 11-12*. 52 .
- Held, D. 2006. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Heryanto, A. 2004. Ideological Baggage and Orientations of the Social Sciences in Indonesia. In V. R. Hadiz, & D. Dhakidae (Eds.), *in Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta and Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte. Ltd. and ISEAS.
- Hidayat, S., & van Klinken, G. 2009. Provincial Business and Politics. In G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), *State of Authority: The State in Society in Indonesia*. Itacha New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Khan, M. H., & Kwame Sundaram, J. 2000. Introduction. In M. H. Khan, & J. Kwame Sundaram, *Rents, Rent-Seeking, and Economic Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kingsbury, D., & Aveling, H. (Eds.). 2003. *Autonomy and Disintegration in Indonesia*. London: RoutledgeCurzon.
- Kurniadi, B. D. 2008. *The Early Period Of Decentralization In Indonesia: A Critique Of Vedi Hadiz's Article*. unpublished manuscript.
- Masaaki, O., & Hamid, A. 2008. Jawa in Power, 1999-2007. *Indonesia No.86 October* .

- Mietzner, M. 2012. Jeffrey Winters' Oligarchy is an epic work of comparative political insight but has little that is new to add to the study of Indonesia's politics. A Review. *Inside Indonesia* 110: Oct-Dec .
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. 2007. Introduction. In H. S. Nordholt, & G. van Klinken (Eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Soeharto Indonesia*. Leiden: KITLV.
- Pratikno, & Kurniawan, N. I. 2010. Struggle to Gain Representation: Mixed Politics in Democratizing Indonesia. *PCD Journal Vol. 1 No.1* .
- Reid, A. 1979. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in An Age of Market*. London: RoutledgeCurzon.
- Ryter, L. 2009. Their Moment in the Sun: The New Indonesian Parliamentarians from the Old OKP. In G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), *State of Authority: The State in Society in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Sidel, J. T. 2004. Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongmen'. In J. Harriss, K. Stokke, & O. Törnquist (Eds.), *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation* (pp. 51-74). Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Stake, R. E. 2000. Case Study. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Stokke, K. 2002. *Habitus, capital and fields: Conceptualizing the capacity of actors in local politics*. Unpublished manuscript, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.
- Stokke, K., & Selboe, E. 2009. Symbolic Representation as Political Practice. In *Rethinking Popular Representation*. Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Stoler, A. L. 1995. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. Michigan: The University of Michigan.
- Székeley, L. 1995. Yang Dibutuhkan Hanyalah Berkulit Putih. In A. Reid, *Sumatera Tempoe Doeloe: dari MarcoPolo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Székeley-Lulofs, M. 1995. Kehidupan Perempuan di Perkebunan. In A. Reid, *Sumatera Tempoe Doeloe: dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Törnquist, O. 2009. Indonesia's Held Back Democracy and Beyond Introduction and Executive Briefing: Advances, Setbacks and Options, 2003-2007. In W. P. Samadhi, & N. Warouw (Eds.), *Building Democracy on the Sand: Advances and Setbacks in Indonesia*. Yogyakarta: PCD Press & Demos.
- Törnquist, O. 2009. Introduction: The Problem is Representation! Towards an Analytical Framework. In O. Törnquist, N. Webster, & K. Stokke (Eds.), *Rethinking Popular Representation*. Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Tresnawati, E., Rifai, B., Rizal, M., Hikmat, I., & Shintami, M. (2012, October). 3000 Orang Dibantai. *Majalah Detik No.44* .
- Umar, A. R. 2010. Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia,. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* , 14 No 2.
- van Klinken, G. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia; Small Town Wars* . Leiden: KITLV.
- van Klinken, G. 2009. Patronage Democracy in Provincial Indonesia. In O. Törnquist, N. Webster, & K. Stokke (Eds.), *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave MacMillan.
- Vel, J. 2009. Reading Politics from a Book of Donations: The Moral Economy of the Political Class in Sumba. In G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), *State of Authority: The State in Society in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.